BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019, dan dengan adanya penyebaran Pandemi Virus Corona Virus Disiase 2019 (COVID 19) telah di tetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (COVID 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 /PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistim Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desiase 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Prekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367)
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) ;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (Covid – 19) dan /atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Prekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 2);

MEUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019 TATACARA PEMBAGIAN DAN PENTAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 2) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah dan setelah angka 7 ditambah angka 8, sehingga berbunyi sebagai berikut:

   1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

   3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

   4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

   5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

   5A. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuanagn selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.

   6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

7. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
8. Bantuan langsung tunai desa yang selanjutnya di singkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi corona virus disease (Covid 19);

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (4), ayat (5), ayat (8) dan ayat (9) diubah serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
   (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
   (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
   (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
   (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
      a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan

c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

a. Tahap I berupa:

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;

b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

c. Tahap III berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(6) dihapus.

(7) dihapus

(8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(10). Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran data dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri.

(11). Berdasarkan penyaluran Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati dan Kepala KPPN.

(12). Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(13). Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D dan Pasal 11E yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati dengan tambahan ketentuan:
   a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing- masing:
      1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLTDesa;
      2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
      3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
   b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5); dan
   c. Dana Desa tahap 1 diprioritaskan untuk BLT Desa.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
   a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
      1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5); dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing- masing:

a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;

b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):

a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5); dan

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 11B

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

Pasal 11C

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19),* antara lain berupa:
a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease2019 (COVID-19);* dan/atau
b. jaring pengaman sosial di Desa.

(3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 11D

(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11C ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

(2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
b. tidak termasuk penenma bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

(4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

(6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.

(7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi,kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

(9) Mekanisme penyaluran BLT Desa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (melalui transfer rekening antar rekening bank/jasa pengiriman uang milik pemerintah/cashless) kepada penerima BLT Desa sesuai kondisi setiap desa dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuan.

Pasal 11 E

(1).Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;

(2). Format laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11C ayat (2) dan ayat (3) setelah mendapat persetujuan bupati.
(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
(3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrsi.

7. Ketentuan Pasal 14A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1) Kepala desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.

(2) Kepala desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober
2020.

(3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.

(4) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.

(5) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

M. JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG
TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN PERUBAHAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (AWAL)	PAGU DANA DESA (PERUBAHAN)
1	Keruak	Tanjung Luar	1,464,932,000	1,454,125,000
2	Keruak	Pijot	1,472,406,000	1,461,599,000
3	Keruak	Selebung Ketangga	1,097,404,000	1,086,597,000
4	Keruak	Sepit	1,075,475,000	1,064,668,000
5	Keruak	Batu Putik	1,258,587,000	1,247,780,000
6	Keruak	Senyiur	1,029,990,000	1,019,183,000
7	Keruak	Keruak	954,791,000	943,984,000
8	Keruak	Ketapang Raya	1,153,197,000	1,142,390,000
9	Keruak	Pijot Utara	1,114,062,000	1,103,255,000
10	Keruak	Dane Rase	1,104,488,000	1,093,681,000
11	Keruak	Ketangga Jeraeng	1,076,118,000	1,065,311,000
12	Keruak	Mendana Raya	926,896,000	916,089,000
13	Keruak	Setungkep Lingsar	1,022,465,000	1,011,658,000
14	Keruak	Montong Belae	926,028,000	915,221,000
15	Keruak	Pulau Maringkik	1,212,287,000	1,201,480,000
16	Sakra	Suwangi	1,304,678,000	1,293,871,000
17	Sakra	Sakra	2,244,807,000	2,234,000,000
18	Sakra	Kabar	1,004,480,000	993,673,000
19	Sakra	Rumbuk	1,230,712,000	1,219,905,000

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (AWAL)	PAGU DANA DESA (PERUBAHAN)
20	Sakra	Keselet	1,068,357,000	1,057,550,000
21	Sakra	Sakra Selatan	1,532,900,000	1,522,093,000
22	Sakra	Rumbuk Timur	1,266,985,000	1,256,178,000
23	Sakra	Suwangi Timur	1,171,436,000	1,160,629,000
24	Sakra	Moyot	963,561,000	952,754,000
25	Sakra	Songak	1,180,764,000	1,169,957,000
26	Sakra	Peresak	980,340,000	969,533,000
27	Sakra	Kuang Baru	927,891,000	917,084,000
28	Terara	Jenggik	1,370,920,000	1,360,113,000
29	Terara	Rarang	1,219,297,000	1,208,490,000
30	Terara	Suradadi	1,554,300,000	1,543,493,000
31	Terara	Santong	1,420,630,000	1,409,823,000
32	Terara	Terara	1,321,658,000	1,310,851,000
33	Terara	Sukadana	1,496,816,000	1,486,009,000
34	Terara	Rarang Selatan	1,121,569,000	1,110,762,000
35	Terara	Leming	1,262,323,000	1,251,516,000
36	Terara	Lando	1,824,104,000	1,813,297,000
37	Terara	Rarang Tengah	1,324,386,000	1,313,579,000
38	Terara	Embung Raja	1,231,993,000	1,221,186,000
39	Terara	Selagik	1,192,326,000	1,181,519,000
40	Terara	Embung Kandong	1,052,616,000	1,041,809,000
41	Terara	Kalianyar	1,148,301,000	1,137,494,000
42	Terara	Rarang Batas	1,108,003,000	1,097,196,000
43	Terara	Pandan Duri	1,179,470,000	1,168,663,000
44	Sikur	Semaya	1,467,905,000	1,457,098,000
45	Sikur	Sikur	1,164,386,000	1,153,579,000
46	Sikur	Montong Baan	1,402,471,000	1,391,664,000
47	Sikur	Loyok	1,332,986,000	1,322,179,000
48	Sikur	Kota Raja	2,053,593,000	2,042,786,000
49	Sikur	Tete Batu	1,975,906,000	1,965,099,000
50	Sikur	Kembang Kuning	1,106,520,000	1,095,713,000

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (AWAL)	PAGU DANA DESA (PERUBAHAN)
51	Sikur	Montong Baan Selatan	1,600,098,000	1,589,291,000
52	Sikur	Gelora	1,316,684,000	1,305,877,000
53	Sikur	Darmasari	1,419,671,000	1,408,864,000
54	Sikur	Tetebatu Selatan	1,194,583,000	1,183,776,000
55	Sikur	Jeruk Manis	1,264,309,000	1,253,502,000
56	Sikur	Sikur Selatan	1,164,652,000	1,153,845,000
57	Sikur	Sikur Barat	923,241,000	912,434,000
58	Masbagik	Kesik	1,640,390,000	1,629,583,000
59	Masbagik	Paokmotong	1,868,588,000	1,857,781,000
60	Masbagik	Masbagik Selatan	1,636,551,000	1,625,744,000
61	Masbagik	Masbagik Timur	1,715,181,000	1,704,374,000
62	Masbagik	Masbagik Utara	1,410,705,000	1,399,898,000
63	Masbagik	Danger	1,834,137,000	1,823,330,000
64	Masbagik	Lendang Nangka	1,561,614,000	1,550,807,000
65	Masbagik	Masbagik Utara Baru	1,383,775,000	1,372,968,000
66	Masbagik	Lendang Nangka Utara	1,803,797,000	1,792,990,000
67	Masbagik	Kumbang	1,333,075,000	1,322,268,000
68	Sukamulia	Setanggor	969,001,000	958,194,000
69	Sukamulia	Jantuk	945,062,000	934,255,000
70	Sukamulia	Padamara	1,083,820,000	1,073,013,000
71	Sukamulia	Dasan Lekong	1,524,539,000	1,513,732,000
72	Sukamulia	Sukamulia	1,128,403,000	1,117,596,000
73	Sukamulia	Paok Pampang	1,021,941,000	1,011,134,000
74	Sukamulia	Sukamulia Timur	1,411,668,000	1,400,861,000
75	Sukamulia	Nyiur Tebel	1,130,496,000	1,119,689,000
76	Sukamulia	Setanggor Selatan	951,578,000	940,771,000
77	Selong	Danggen Timur	1,094,077,000	1,083,270,000
78	Pringgabaya	Bagik Papan	1,241,807,000	1,231,000,000
79	Pringgabaya	Apit Aik	2,032,547,000	2,021,740,000
80	Pringgabaya	Kerumut	1,091,848,000	1,081,041,000
81	Pringgabaya	Pohgading	1,957,263,000	1,946,456,000

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (AWAL)	PAGU DANA DESA (PERUBAHAN)
82	Pringgabaya	Batuyang	1,649,965,000	1,639,158,000
83	Pringgabaya	Pringgabaya	3,098,463,000	3,087,656,000
84	Pringgabaya	Labuhan Lombok	2,345,349,000	2,334,542,000
85	Pringgabaya	Pringgabaya Utara	1,715,087,000	1,704,280,000
86	Pringgabaya	Pohgading Timur	1,543,663,000	1,532,856,000
87	Pringgabaya	Teko	1,179,361,000	1,168,554,000
88	Pringgabaya	Anggaraksa	1,127,479,000	1,116,672,000
89	Pringgabaya	Tanak Gadang	1,067,538,000	1,056,731,000
90	Pringgabaya	Gunung Malang	1,988,703,000	1,977,896,000
91	Pringgabaya	Seruni Mumbul	1,643,529,000	1,632,722,000
92	Pringgabaya	Telaga Waru	1,213,364,000	1,202,557,000
93	Aikmel	Lenek	2,028,939,000	2,018,132,000
94	Aikmel	Aikmel	1,590,768,000	1,579,961,000
95	Aikmel	Kalijaga	1,493,735,000	1,482,928,000
96	Aikmel	Kembang Kerang	1,754,332,000	1,743,525,000
97	Aikmel	Lenek Lauk	1,521,903,000	1,511,096,000
98	Aikmel	Lenek Daya	1,825,073,000	1,814,266,000
99	Aikmel	Aikmel Utara	1,064,119,000	1,053,312,000
100	Aikmel	Kalijaga Timur	1,081,187,000	1,070,380,000
101	Aikmel	Kalijaga Selatan	1,151,545,000	1,140,738,000
102	Aikmel	Aikmel Barat	1,071,739,000	1,060,932,000
103	Aikmel	Kembang Kerang Daya	1,611,351,000	1,600,544,000
104	Aikmel	Lenek Baru	1,388,010,000	1,377,203,000
105	Aikmel	Lenek Pasiraman	1,451,488,000	1,440,681,000
106	Aikmel	Toya	1,968,317,000	1,957,510,000
107	Aikmel	Lenek Kali Bambang	1,100,983,000	1,090,176,000
108	Aikmel	Lenek Ramban Biak	1,251,074,000	1,240,267,000
109	Aikmel	Sukarema	1,126,166,000	1,115,359,000
110	Aikmel	Kalijaga Baru	1,139,745,000	1,128,938,000
111	Aikmel	Kalijaga Tengah	1,000,685,000	989,878,000
112	Aikmel	Bagik Nyaka Santri	982,189,000	971,382,000

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (AWAL)	PAGU DANA DESA (PERUBAHAN)
113	Aikmel	Aik Prapa	1,454,677,000	1,443,870,000
114	Aikmel	Lenek Duren	980,089,000	969,282,000
115	Aikmel	Aikmel Timur	1,292,206,000	1,281,399,000
116	Aikmel	Keroya	1,064,202,000	1,053,395,000
117	Sambelia	Obel-obel	1,071,121,000	1,060,314,000
118	Sambelia	Belanting	1,793,343,000	1,782,536,000
119	Sambelia	Sambalia	1,636,050,000	1,625,243,000
120	Sambelia	Labuhan Pandan	1,551,479,000	1,540,672,000
121	Sambelia	Sugian	1,580,939,000	1,570,132,000
122	Sambelia	Darakunci	1,779,542,000	1,768,735,000
123	Sambelia	Bagik Manis	1,214,573,000	1,203,766,000
124	Sambelia	Dadap	1,438,466,000	1,427,659,000
125	Sambelia	Madayin	1,904,532,000	1,893,725,000
126	Sambelia	Senanggalih	1,116,650,000	1,105,843,000
127	Sambelia	Padak Guar	1,204,999,000	1,194,192,000
128	Montong Gading	Pringga Jurang	1,105,386,000	1,094,579,000
129	Montong Gading	Montong Betok	1,498,494,000	1,487,687,000
130	Montong Gading	Kilang	1,438,753,000	1,427,946,000
131	Montong Gading	Perian	1,380,739,000	1,369,932,000
132	Montong Gading	Jenggik Utara	1,352,293,000	1,341,486,000
133	Montong Gading	Pringgajurang Utara	1,350,511,000	1,339,704,000
134	Montong Gading	Pesanggrahan	1,564,172,000	1,553,365,000
135	Montong Gading	Lendang Belo	1,276,003,000	1,265,196,000
136	Pringgasela	Rempung	1,142,203,000	1,131,396,000
137	Pringgasela	Pringgasela	1,325,706,000	1,314,899,000
138	Pringgasela	Jurit	1,366,017,000	1,355,210,000
139	Pringgasela	Pengadangan	2,700,039,000	2,689,232,000
140	Pringgasela	Aik Dewa	1,209,660,000	1,198,853,000
141	Pringgasela	Jurit Baru	1,643,229,000	1,632,422,000
142	Pringgasela	Pringgasela Selatan	1,269,980,000	1,259,173,000
143	Pringgasela	Pengadangan Barat	1,529,018,000	1,518,211,000

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (AWAL)	PAGU DANA DESA (PERUBAHAN)
144	Pringgasela	Timbanuh	1,197,468,000	1,186,661,000
145	Pringgasela	Pringgasela Timur	1,145,596,000	1,134,789,000
146	Suralaga	Anjani	1,777,244,000	1,766,437,000
147	Suralaga	Tebaban	1,168,564,000	1,157,757,000
148	Suralaga	Kerongkong	998,235,000	987,428,000
149	Suralaga	Bagik Payung	1,577,875,000	1,567,068,000
150	Suralaga	Suralaga	1,366,083,000	1,355,276,000
151	Suralaga	Bagik Payung Selatan	1,331,125,000	1,320,318,000
152	Suralaga	Tumbuh Mulia	1,001,286,000	990,479,000
153	Suralaga	Dasan Borok	1,091,420,000	1,080,613,000
154	Suralaga	Gerung Permai	938,982,000	928,175,000
155	Suralaga	Dames Damai	1,041,739,000	1,030,932,000
156	Suralaga	Bagik Payung Timur	1,476,089,000	1,465,282,000
157	Suralaga	Waringin	1,053,427,000	1,042,620,000
158	Suralaga	Gapuk	964,355,000	953,548,000
159	Suralaga	Bintang Rinjani	1,045,929,000	1,035,122,000
160	Suralaga	Paok Lombok	1,138,025,000	1,127,218,000
161	Wanasaba	Mamben Daya	1,583,122,000	1,572,315,000
162	Wanasaba	Mamben Lauk	1,199,069,000	1,188,262,000
163	Wanasaba	Wanasaba	1,150,976,000	1,140,169,000
164	Wanasaba	Karang Baru	925,707,000	914,900,000
165	Wanasaba	Bebidas	1,493,639,000	1,482,832,000
166	Wanasaba	Tembeng Putik	1,140,914,000	1,130,107,000
167	Wanasaba	Wanasaba Lauk	1,139,188,000	1,128,381,000
168	Wanasaba	Beriri Jarak	1,155,989,000	1,145,182,000
169	Wanasaba	Bandok	1,134,415,000	1,123,608,000
170	Wanasaba	Mamben Baru	950,067,000	939,260,000
171	Wanasaba	Otak Rarangan	975,696,000	964,889,000
172	Wanasaba	Jineng	949,105,000	938,298,000
173	Wanasaba	Wanasaba Daya	1,091,063,000	1,080,256,000
174	Wanasaba	Karang Baru Timur	913,986,000	903,179,000

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (AWAL)	PAGU DANA DESA (PERUBAHAN)
175	Sembalun	Sembalun Bumbung	2,254,941,000	2,244,134,000
176	Sembalun	Sembalun Lawang	1,733,499,000	1,722,692,000
177	Sembalun	Sajang	1,452,012,000	1,441,205,000
178	Sembalun	Bilok Petung	1,483,408,000	1,472,601,000
179	Sembalun	Sembalun	1,546,162,000	1,535,355,000
180	Sembalun	Sembalun Timba Gading	1,461,878,000	1,451,071,000
181	Suwela	Selaparang	1,240,933,000	1,230,126,000
182	Suwela	Ketangga	1,440,612,000	1,429,805,000
183	Suwela	Suntalangu	1,563,835,000	1,553,028,000
184	Suwela	Suela	1,730,306,000	1,719,499,000
185	Suwela	Sapit	1,514,748,000	1,503,941,000
186	Suwela	Perigi	2,218,077,000	2,207,270,000
187	Suwela	Mekar Sari	1,783,008,000	1,772,201,000
188	Suwela	Puncak Jeringo	1,177,951,000	1,167,144,000
189	Labuhan Haji	Labuhan Haji	1,411,907,000	1,401,100,000
190	Labuhan Haji	Peneda Gandor	1,192,355,000	1,181,548,000
191	Labuhan Haji	Teros	1,022,511,000	1,011,704,000
192	Labuhan Haji	Korleko	1,299,478,000	1,288,671,000
193	Labuhan Haji	Kertasari	1,220,252,000	1,209,445,000
194	Labuhan Haji	Tirtanadi	1,219,310,000	1,208,503,000
195	Labuhan Haji	Banjarsari	1,098,283,000	1,087,476,000
196	Labuhan Haji	Korleko Selatan	1,045,798,000	1,034,991,000
197	Sakra Timur	Gelanggang	1,632,974,000	1,622,167,000
198	Sakra Timur	Surabaya	1,316,194,000	1,305,387,000
199	Sakra Timur	Lepak	1,321,796,000	1,310,989,000
200	Sakra Timur	Gereneng	1,432,208,000	1,421,401,000
201	Sakra Timur	Montong Tangi	1,303,193,000	1,292,386,000
202	Sakra Timur	Menceh	1,826,640,000	1,815,833,000
203	Sakra Timur	Lepak Timur	1,046,943,000	1,036,136,000
204	Sakra Timur	Surabaya Utara	1,101,468,000	1,090,661,000
205	Sakra Timur	Gereneng Timur	1,319,712,000	1,308,905,000

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (AWAL)	PAGU DANA DESA (PERUBAHAN)
206	Sakra Timur	Lenting	1,131,690,000	1,120,883,000
207	Sakra Barat	Sukarara	1,371,580,000	1,360,773,000
208	Sakra Barat	Gunung Rajak	1,140,304,000	1,129,497,000
209	Sakra Barat	Rensing	1,186,342,000	1,175,535,000
210	Sakra Barat	Bungtiang	1,288,693,000	1,277,886,000
211	Sakra Barat	Pengkelak Mas	1,113,835,000	1,103,028,000
212	Sakra Barat	Borok Toyang	1,371,068,000	1,360,261,000
213	Sakra Barat	Rensing Raya	852,105,000	841,298,000
214	Sakra Barat	Pematung	889,178,000	878,371,000
215	Sakra Barat	Jerogunung	937,884,000	927,077,000
216	Sakra Barat	Pejaring	998,047,000	987,240,000
217	Sakra Barat	Boyemare	962,354,000	951,547,000
218	Sakra Barat	Montong Beter	1,142,188,000	1,131,381,000
219	Sakra Barat	Mengkuru	1,028,647,000	1,017,840,000
220	Sakra Barat	Gadungmas	963,166,000	952,359,000
221	Sakra Barat	Kembang Are Sampai	969,757,000	958,950,000
222	Sakra Barat	Rensing Bat	930,203,000	919,396,000
223	Sakra Barat	Tanak Kaken	1,026,238,000	1,015,431,000
224	Sakra Barat	Gerisak Semanggeleng	1,060,611,000	1,049,804,000
225	Jerowaru	Batu Nampar	1,141,045,000	1,130,238,000
226	Jerowaru	Sukaraja	1,182,799,000	1,171,992,000
227	Jerowaru	Jerowaru	1,749,082,000	1,738,275,000
228	Jerowaru	Pemongkong	1,290,776,000	1,279,969,000
229	Jerowaru	Sekaroh	1,656,453,000	1,645,646,000
230	Jerowaru	Pandan Wangi	1,697,537,000	1,686,730,000
231	Jerowaru	Wakan	1,589,689,000	1,578,882,000
232	Jerowaru	Kwang Rundun	995,802,000	984,995,000
233	Jerowaru	Ekas Buana	1,275,541,000	1,264,734,000
234	Jerowaru	Sepapan	1,278,490,000	1,267,683,000
235	Jerowaru	Seriwe	1,300,555,000	1,289,748,000
236	Jerowaru	Pene	1,045,041,000	1,034,234,000

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (AWAL)	PAGU DANA DESA (PERUBAHAN)
237	Jerowaru	Batunampar Selatan	1,068,424,000	1,057,617,000
238	Jerowaru	Sukadamai	985,167,000	974,360,000
239	Jerowaru	Pare Mas	1,070,500,000	1,059,693,000
	TOTAL		316,384,098,000	313,801,225,000

BUPATI LOMBOK TIMUR

M. SUKIMAN AZMY

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....
PEMERINTAH DESA .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Pagu Desa Rp.

Rekening 1 a	Rekening 1 b	Rekening 1 c	Rekening 2 a	Rekening 2 b	Rekening 2 c	Rekening 2 d	URAIAN	URAIAN KELURAHAN	VOLUME KELURAHAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp.	KPM KK	UPAH Rp.	KET
1							2	3	4	5	6	7	8= 6-7	9	10	11	12	13	14	15
			4				PENDAPATAN													
			4	2			TRANSFER													
			4	2	1		DANADESA													
							JUMLAH PENDAPATAN													
			5				BELANJA													
1							BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN													
1	1						SUB BIDANG													
1	1	01					KEGIATAN													
1	1	02					dst.....													
2							BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA													
2	1						SUB BIDANG													
2	1	01					KEGIATAN													
2	1	02					dst													
3							BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA													
3	1						SUB BIDANG													
3	1	01					KEGIATAN													
3	1	02					dst													
4							BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA													
4	1						SUB BIDANG													
4	1	01					KEGIATAN													
4	1	02					dst													
5							BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA													
5	1						SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA													
5	1	00					PENANGGULANGANBENCANA													
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga													

5	1	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga												
5	1	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga												
							1. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa *)												
							2. Penyediaan Obat-obatan *)												
							3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri *)												
							4. Penyediaan Alat Perlindungan Diri (Masker, APDuntuk Relawan, dst) *)												
							5. Pembuatan Antiseptik (hand sanitizer)/Disinfektan *)												
							6. dll *)												
5	2						SUB BIDANG KEADAAN DARURAT												
5	2	00					KEADAAN DARURAT												
5	2	00	5	4			Belanja Tak Terduga												
5	2	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga												
5	2	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga												
							SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK												
							KEADAAN MENDESAK												
							Belanja Tak Terduga												
							Belanja Tak Terduga												
							Belanja Tak Terduga												
							1. Belanja Langsung Tunai (BLT)*)												
							BLT Bulan Pertama												
							BLT Bulan ke.....dst												
6							PEMBIAYAAN												
6	2						Pengeluaran Pembiayaan												
6	2	2					Penyertaan Modal Desa												
6	2	2	1				Penyertaan Modal Desa												
							JUMLAH PEMBIAYAAN												
							JUMLAH												
							(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)												

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan.

....., ... 2020
Kepala Desa

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolorn 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolorn 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misa1:swakelola, kontraktual
6	Kolorn 6 diisi denganjumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan nan fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerjay kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan
	Pembangunan Desa.
11	Kolorn 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sa sial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

B. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT - DESA)
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
13					
14					
15					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS DESA

(.....)

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETATIS DESA

(.....)

MENGETAHUI
KEPALA DESA

(.....)

BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY